

## Exemption of Fiscal Exit Tax: Its Impact on International Flights and Tax Revenue

Joko Mariyono

Department of Economics, Universitas Pancasakti Tegal  
Jl. Halmahera Km-1, Tegal, Indonesia. Telp: +62-0283-351082; E-mail: mrjoko28@gmail.com

*Received: February 2015; Accepted: May 2015*

### Abstract

Fiscal tariff is considered as personal income tax, collected in advance when adult people who have been staying in Indonesia for more than 183 days go overseas. The magnitude of tariff was sometime much greater than the airfare itself, particularly for international flight to ASEAN member countries. This study aims to measure the impact of elimination of fiscal tariff applied to international flight passenger departing from Indonesia. Potential loss in government revenue from income tax and number of international passengers were analyzed. This study used descriptive and econometric methods. Annual and monthly time series data were collected for publication of the Indonesian Statistical Agency and Central Bank of Indonesia during the periods 2008-2012. The results show that the elimination of fiscal tariff did not affect the government revenue resulting from personal income tax. The impact of tariff elimination was to increase the rate in number of passengers going overseas.

**Keywords:** fiscal tariff, government revenue, flight passenger, income tax

**JEL classification:** R41; H24

## Penghapusan Fiskal Luar Negeri: Dampaknya terhadap Penerbangan Internasional dan Penerimaan Pajak

### Abstrak

Tarif fiskal merupakan pajak penghasilan pribadi, yang dipungut di depan ketika orang dewasa yang telah tinggal di Indonesia selama 183 hari pergi ke luar negeri. Besarnya tarif terkadang jauh lebih besar daripada harga tiket, khususnya untuk penerbangan internasional ke negara-negara ASEAN. Kajian ini bertujuan mengukur dampak penghapusan tarif fiskal yang dikenakan kepada penumpang penerbangan internasional yang berangkat dari Indonesia. Potensi kerugian pada penerimaan pemerintah adalah hilangnya penerimaan negara dari pajak penghasilan dan jumlah penerbangan internasional. Kajian ini menggunakan metode deskriptif dan ekonometrik. Data runtut waktu tahunan dan bulanan dikumpulkan dari publikasi Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia selama periode 2008-2012. Hasil analisis menunjukkan bahwa penghapusan tarif fiskal tidak mempengaruhi penerimaan negara dari pajak penghasilan pribadi. Penghapusan tarif fiskal berdampak meningkatkan jumlah penumpang penerbangan internasional.

**Kata kunci:** tarif fiskal, penerimaan negara, penumpang penerbangan, pajak penghasilan

**Klasifikasi JEL:** R41; H24

### 1. Pendahuluan

Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak penghasilan di muka bagi orang pribadi yang akan pergi ke luar negeri. Ditinjau dari latar belakang keluarnya pemungutan

fiskal, adalah untuk mencegah arus dana ke luar negeri seiring dengan semakin banyaknya orang yang bepergian ke luar negeri. Kalau kepergian itu untuk sesuatu yang produktif atau menghasilkan, tentu tidak ada persoalan. Namun, kalau sekedar untuk keperluan kon-

sumtif seperti berbelanja dan berwisata akan memboroskan devisa negara. Karena itu, kepergian orang ke luar negeri pun perlu dibatasi dan dikendalikan. Namun demikian, kebijakan tersebut sudah dianggap usang dan perlu ditiadakan, seiring dengan era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas.

Pemerintah telah menerapkan bebas biaya fiskal perjalanan ke luar negeri mulai Januari 2011. Kebijakan baru itu memperluas ketentuan bebas fiskal terbatas yang sudah berlaku, yakni hanya bagi wajib pajak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dengan kebijakan baru ini, wajib pajak tak perlu lagi menunjukkan kartu NPWP untuk mendapatkan pembebasan biaya fiskal tersebut.

Sebelum bebas fiskal terbatas berlaku, wajib pajak orang pribadi yang bepergian ke luar negeri wajib membayar biaya fiskal sebesar Rp1.500.000 pada tahun 2009, dan Rp2.500.000 pada tahun 2010 jika bepergian melalui udara. Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan aturan mengenai pembebasan fiskal perjalanan ke luar negeri. Wajib pajak harus menunjukkan kartu NPWP untuk mendapatkan pembebasan fiskal itu sebagai bagian dari sosialisasi NPWP 2010.

Tentunya akan ada perbedaan kepentingan dan cara melihat persoalan. Menteri Keuangan terlihat agak keberatan kalau langsung dihapuskan menjadi nol walaupun itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara-negara ASEAN dan banyak negara di dunia. Persoalannya adalah penurunan penerimaan negara dalam APBN. Seperti diketahui bahwa pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan negara (Republik Indonesia, 2012). Menurut data, selama ini pendapatan dari fiskal dalam setahun bisa Rp1,2 triliun. Jika diketatkan lagi kemungkinan bisa lebih besar dari itu (Suara Merdeka, 2004).

Memang harus dipertimbangkan secara matang untung ruginya penghapusan fiskal luar negeri. Bila fiskal dihapuskan, hal itu dapat menggairahkan dunia pariwisata yang peranannya dalam perolehan devisa juga semakin besar. Demikian juga kegiatan promosi perdagangan atau aktivitas pemasaran usaha ke luar negeri bisa lebih gencar. Semua itu bisa

menjadi imbalan bagi kekhawatiran akan banyaknya dana yang ke luar. Dalam konteks ini, ada baiknya pertimbangan stabilitas cadangan devisa tidak dilupakan. Kalau sudah relatif aman, harus segera dilakukan. Negara lain tidak ada yang memungut fiskal seperti yang terjadi di Indonesia. Jadi kebijakan penghapusan fiskal perlu didorong agar segera direalisasi dengan harapan akan memberi manfaat lebih besar.

Hal yang positif adalah adanya keinginan-keinginan untuk memperbaiki kebijakan agar Indonesia tidak terus-menerus menerapkan sesuatu yang sebenarnya kurang tepat. Ini tidak untuk mendongkrak penerimaan negara dari fiskal tanpa memperhitungkan dampak negatif lain yang lebih besar. Salah satunya adalah dengan segera menghapuskan pungutan fiskal ke luar negeri. Perlu dilihat perkembangan lingkungan yang demikian cepat terutama dalam perekonomian. Dunia menjadi semakin terbuka tanpa ada batas. Tanpa banyak kendala untuk saling berinteraksi. Tatanan ekonomi global seperti itu memerlukan antisipasi cepat dalam berbagai kebijakan. Tidak boleh lagi adanya belenggu oleh pola-pola pada masa lalu yang lebih tertutup. Berdasarkan dugaan adanya keuntungan dan kerugian akibat penghapusan fiskal luar negeri tersebut, kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dampak penghapusan fiskal luar negeri terhadap jumlah penumpang penerbangan internasional, dan penerimaan negara dari pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi.

**Tinjauan Pustaka.** Berdasarkan sudut pandang politik, definisi kebijakan publik sudah lama dikemukakan di berbagai buku teks. Dye (2008) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan ini agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberikan perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan. Rose (2004) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan.

an dari pada suatu keputusan yang tersendiri. Definisi ini bersifat rancu namun berguna karena kebijakan dipahami sebagai suatu arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Friedrich (2007) memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Definisi ini menyangkut dimensi yang sangat luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok dan individu. Point pentingnya adalah kebijakan dilihat sebagai suatu perilaku (arah tindakan) yang mempunyai maksud dan tujuan.

Berdasar sudut pandang ekonomi publik, Karseno & Adjie (2001) menyatakan bahwa kebijakan publik dipahami sebagai kebijakan, baik politik, ekonomi, dan sosial yang diambil secara kolektif, demi kepentingan/keuntungan masyarakat secara kolektif. Kebijakan publik itu dapat berbentuk norma-norma atau tata nilai perdagangan dalam hubungan ekonomi antara anggota masyarakat; dapat berbentuk pembuatan atau penyediaan barang yang akan dipakai bersama, yang disebut barang publik atau bahkan, dapat berbentuk hukum dan kode etik hubungan antara manusia sebangsa yang sering kita sebut dengan budaya yang diterima secara umum dalam masyarakat itu.

Berbagai macam bentuk kebijakan yang ada pada dasarnya harus mengikuti kehendak pasar dan demi kepentingan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam tahap implementasi dan evaluasi, kebijakan publik yang telah digulirkan oleh pemerintah sebagai suatu pola perilaku yang mempertimbangkan arah tindakan dan sasaran-sasaran tertentu yang ingin dicapai, tidak akan lepas dari peran masyarakat. Jadi dapat dijelaskan bahwa masyarakat berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, bukan sebagai obyek baik dalam perumusan, pelaksanaan,

maupun dalam tahap evaluasi kebijakan. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian segala bentuk sumber daya demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Banyak kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan luar negeri, yang intinya memperbaiki sistem agar menjadi lebih efisien. Seperti kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ongkos, misalnya penghapusan tarif impor dan pajak ekspor, dan perjanjian-perjanjian yang mempererat hubungan antarnegara. Sebagai contoh, di bidang pertanian Erwidodo & Hadi (2003) menganalisis dampak kebijakan tarif impor jagung, yang memperlihatkan bahwa usahatani jagung masih menguntungkan dan mampu bersaing dengan jagung impor. Kasus lainnya adalah analisis dampak kebijakan proteksi yang merupakan kombinasi tarif dan nontarif yang meningkatkan harga produsen, jumlah produksi, surplus produsen dan pendapatan petani serta menurunkan impor produk pertanian secara signifikan (Hadi & Wiryono, 2005; Hadi & Nuryanti, 2005).

Analisis dampak kebijakan yang berhubungan dengan globalisasi juga sudah banyak dilakukan. Jalles (2012) menjelaskan bahwa kebijakan masuknya negara dalam perdagangan internasional di Asia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sheng *et al.* (2012) juga mengemukakan bahwa dampak persetujuan dalam perdagangan telah meningkatkan hubungan bilateral antara negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat China. Ridwan (2009) menunjukkan bahwa kebijakan integrasi ASEAN telah meningkatkan investasi. Hal yang penting adalah kebijakan dalam ikut serta dalam perdagangan internasional berdampak meningkatnya produktivitas (Alcala & Ciccone, 2004).

Sampai saat ini belum banyak kajian yang menelaah dampak penghapusan fiskal luar

negeri yang baru saja diberlakukan. Satu kajian yang dilakukan oleh Barus (2009) menyebutkan bahwa adanya pembebanan fiskal kepada calon penumpang ke luar negeri menyebabkan calon penumpang membatalkan rencana perjalanan ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena biaya fiskal jauh lebih tinggi dibanding harga tiket pesawat itu sendiri untuk jarak dekat. Seperti yang dilaporkan di Aceh bahwa penjualan tiket pesawat terbang rute Banda Aceh-Penang dan Kuala Lumpur (Malaysia) dilaporkan menurun sampai dengan 50% sebagai akibat pemberlakuan tarif baru fiskal bagi masyarakat yang bepergian ke luar negeri (Berita Daerah, 2009). Penghapusan fiskal luar negeri jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi, merupakan pengurangan ongkos bagi orang yang sudah tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Biaya ini relatif besar jika tujuan penerbangan ke negara-negara anggota ASEAN. Jika biaya ini ditiadakan, sudah tentu akan berdampak pada jumlah penumpang penerbangan internasional di satu pihak, dan potensi hilangnya pendapatan negara dari fiskal luar negeri di lain pihak. Kajian ini akan menelaah dua sisi tersebut.

## 2. Metode Penelitian

Dampak kebijakan penghapusan pembayaran fiskal dilakukan secara deskriptif karena penerimaan negara dari pajak dihitung setiap tahun. Dampak penghapusan fiskal dapat diketahui setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, yaitu setelah tanggal 1 Januari 2011. Alat bantu analisis yang digunakan adalah diagram garis.

Sedangkan dampaknya terhadap jumlah penumpang penerbangan internasional, model analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah fungsi permintaan, yang banyak dikemukakan dalam berbagai buku teks ekonomi mikro (antara lain: Nicholson dan Snyder, 2011; Baumol dan Blinder, 2007). Untuk keperluan analisis manajerial, Salvatore (2007) menyebutkan bahwa model permintaan berguna sebagai alat analisis. Model permintaan dapat digunakan sebagai alat analisis yang mengkaji kebijakan pemerintah, seperti yang

telah dilakukan oleh Mariyono (2006; 2008a; 2008b) yang menganalisis dampak penghapusan subsidi pestisida dan pelaksanaan program nasional pertanian di Indonesia. Model fungsi permintaan juga telah digunakan untuk kajian sosial (Mariyono & Kuntariningsih, 2009).

Asumsi yang digunakan bahwa dalam jangka pendek penawaran penerbangan internasional tetap, maka respon dalam jangka pendek adalah perubahan permintaan<sup>1</sup>. Model fungsi permintaan dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$PI = \beta_0 + \beta_1 IHK + \beta_2 NTR + \beta_3 PDB + \beta_4 FLN + \beta_5 T + \beta_6 (FLN \cdot T) + \varepsilon \quad (1)$$

di mana **PI**: Penumpang internasional, **IHK** adalah indeks harga konsumen, **NTR** adalah nilai tukar Rp terhadap dolar US\$, **PDB** adalah produk domestik bruto, **FLN** adalah variabel dummy untuk fiskal luar negeri, 1 = ada fiskal, **T** adalah tren waktu,  **$\beta$**  adalah koefisien regresi,  **$\varepsilon$**  adalah error term

IHK merupakan gambaran perubahan harga penerbangan internasional di dalam negeri. IHK dipakai sebagai indikator harga karena harga untuk setiap penerbangan ke semua tujuan dalam jangka pendek dianggap tetap. Kenaikan IHK diharapkan akan berpengaruh negative terhadap permintaan penerbangan internasional. NTR juga merupakan indikator harga, karena harga tiket penerbangan internasional dinilai dengan US\$. Jika Rp melemah terhadap US\$, maka harga tiket penerbangan internasional menjadi naik jika harga tiket dinilai dengan Rp. NTR diharapkan berpenga-

<sup>1</sup> Dalam jangka pendek, penawaran penerbangan internasional adalah tetap karena untuk menambah jumlah tempat duduk diperlukan pemesanan pesawat baru dan proses perijinan yang cukup lama. Mengingat persaingan antarmaskapai sangat ketat, maka jumlah tempat duduk yang tersedia masih belum mencapai kapasitas penuh. Data BPS (2012) pada tahun 2010, menunjukkan jumlah kursi yang tersedia sebanyak 22.686.349 sedangkan yang terpakai sebanyak 16.369.348 tempat duduk.

Tabel 1. Definisi dan pengukuran variabel

Nama	Definisi	Satuan
PI	Jumlah penumpang penerbangan internasional dalam satu bulan yang berangkat dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Polonia	Orang
IHK	Indeks harga konsumen bulanan yang dilaporkan oleh Bank Indonesia (2000=100)	Numerik
NTR	Nilai tukar Rupiah rata-rata dalam satu bulan terhadap US\$, 1 US\$ = Rp ...	Rupiah
PDB	Produk domestic bruto harga konstan setiap tiga bulan	Milyar
FLN	Variabel <i>dummy</i> pada saat diberlakukan pembayaran fiskal luar negeri	1= ada fiskal
T	Tren waktu yang dimulai dengan 1=Januari 2008	Numerik

ruh negatif terhadap permintaan penerbangan internasional. PDB merupakan ukuran pendapatan yang diharapkan berpengaruh positif terhadap permintaan penerbangan internasional. Ini didasarkan pada asumsi bahwa penerbangan ke luar negeri merupakan barang normal (Nicholson & Snyder, 2011). FLN menunjukkan periode pada saat diberlakukan fiskal, yang dalam hal ini mengukur rata-rata jumlah penumpang internasional pada saat ada fiskal. T merupakan tren waktu untuk melihat laju peningkatan jumlah permintaan setiap satuan waktu. FLN\*T mengukur laju peningkatan jumlah permintaan selama diberlakukan pembayaran fiskal luar negeri.

Kajian ini menggunakan data bulanan runtut waktu pada periode Januari 2008 sampai dengan Juni 2012. Periode mulai Januari 2011 sudah tidak berlaku pembayaran fiskal luar negeri. Data dikumpulkan dari publikasi Biro Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Definisi dan pengukuran variabel yang diguna-

kan pada kajian ini disajikan di Tabel 1, sedangkan ringkasan data tersebut disajikan di Tabel 2. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa terdapat variasi yang cukup besar untuk masing-masing variabel. Variasi tersebut diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas yang dianalisis.

Prosedur ekonometri digunakan untuk analisis dalam kajian ini. Karena kajian ini menggunakan data runtut waktu, maka dilakukan uji autokorelasi, stasioner dan ko-integrasi (Wooldridge, 2009). Jika terdapat hasil yang menyimpang dari ketentuan, maka dilakukan koreksi agar hasil yang diperoleh tidak menyimpang dan dapat dipercaya.

Analisis awal dengan uji Dicky-Fuller menunjukkan bahwa beberapa variabel memberikan indikasi tidak stasioner (lihat Lampiran 1). Selain itu, uji Durbin-Watson juga menunjukkan auto-korelasi yang sangat kuat. Setelah ditelaah, lebih lanjut, autokorelasi dapat diata-

Tabel 2. Ringkasan data yang digunakan dalam analisis

Variabel	Observasi	Nilai rata-rata	Dev. Standar	Nilai Minimum	Nilai Maximum
Penumpang Internasional	54	693950	129664,8	461088	944809
Indeks Harga Konsumen	55	125,01	13,18932	110,08	164,01
Nilai Tukar Rupiah	54	9258	391,3	8473	9691
Produk Domestik Bruto	54	572379	42170.9	505218.8	632772,5
Fiskal Luar Negeri	54	0,7037	0,4609	0	1

Sumber: Hasil analisis

si dengan memasukkan lag-1 untuk jumlah penumpang penerbangan internasional. Dengan demikian model (1) berubah menjadi:

$$PI = \beta_0 + \beta_1 IHK + \beta_2 NTR + \beta_3 PDB + \beta_4 FLN + \beta_5 T + \beta_6 (FLN \cdot T) + PI_{-1} + \varepsilon \quad (2)$$

di mana  $PI_{-1}$  jumlah penumpang penerbangan internasional bulan bulan sebelumnya.

Analisis selanjutnya menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara PDB dan T yaitu sebesar 0,97 (lihat Lampiran 2). Hal ini menyebabkan terjadinya multikolinear, sehingga signifikansi koefisien PDB dan T tidak terlihat secara bersama-sama (Gujarati, 2003). Sesuai dengan prosedur yang dikemukakan Gujarati (2003), untuk mengatasi masalah ini digunakan prediksi  $\overline{PDB}$  dari hasil regresi:

$\overline{PDB} = \alpha_0 + \alpha_1 T + \vartheta$ . Dengan demikian model (2) berubah menjadi:

$$PI = \beta_0 + \beta_1 IHK + \beta_2 NTR + \beta_3 \overline{PDB} + \beta_4 FLN + \beta_5 (FLN \cdot \overline{PDB}) + \beta_6 PI_{-1} + \varepsilon \quad (3)$$

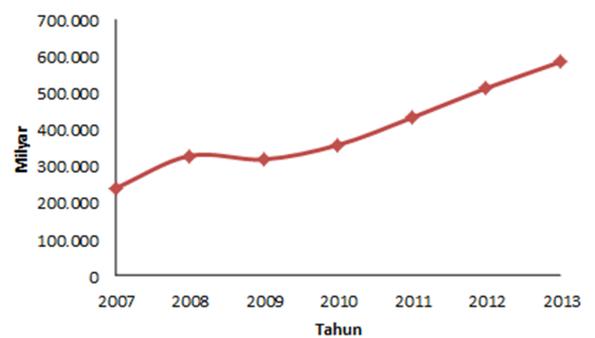
Uji Durbin-Watson dan kointegrasi pada model (2) dan (3) menunjukkan tidak ada masalah auto-korelasi dan ada ko-integrasi diantara variabel-variabel yang dipakai dalam analisis, yang artinya bahwa hasil analisis dapat dipercaya (lihat Lampiran).

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pada Gambar 1 terlihat perkembangan penerimaan negara dari pajak penghasilan terus meningkat. Bahkan, mulai tahun 2010 pada saat pembebasan fiskal luar negeri bagi pemegang NPWP, peningkatan penerimaan negara dari pajak penghasilan semakin tinggi. Setelah pembebasan biaya fiskal luar negeri tanpa syarat pun, jumlah penerimaan negara dari

pajak penghasilan masih terus meningkat, yaitu mulai tahun 2011.

Diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa kebijakan pemberlakuan fiskal penghapusannya tidak signifikan terhadap pemasukan pajak negara (SMINET, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang sudah biasa melakukan perjalanan keluar negeri sebagian besar sudah mempunyai NPWP, sehingga penghapusan fiskal luar negeri tidak berdampak negatif terhadap penerimaan negara dari pajak penghasilan.



Sumber data: BPS, 2013

([http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?))

Gambar 1. Perkembangan penerimaan pajak penghasilan

Ada kekhawatiran bahwa dengan dihapusnya fiskal luar negeri tersebut akan menyebabkan jumlah penerimaan negara dari pajak penghasilan akan turun. Namun hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena jika masyarakat yang membayar fiskal pada saat pergi ke luar negeri, biaya tersebut akan dikurangkan pada beban pajak di akhir tahun. Baik ada fiskal atau pun tidak ada, masyarakat masih tetap membayar pajak penghasilannya jika masyarakat mempunyai NPWP.

Ada indikasi bahwa penghapusan fiskal telah meningkatkan pendapatan perorangan, khususnya pelaku bisnis yang berhubungan dengan luar negeri. Naiknya pendapatan perorangan ini diduga sebagai akibat dari naiknya jumlah penumpang ke luar negeri untuk keperluan bisnis. Hal ini oleh Wijaya (2011) dianggap

Tabel 3. Hasil estimasi model (1)

Variabel bebas	Koef.	Std. Err.	t-stat
Konstanta	81283	518234	0,16 <sup>a</sup>
Indeks Harga Konsumen (IHK)	-152,4	512,3	-0,30 <sup>a</sup>
Nilai Tukar Rupiah (NTR)	-98,62	39,29	-2,51 <sup>b</sup>
Produk Domestik Bruto (PDB)	1,9961	0,7578	2,63 <sup>b</sup>
Fiskal Luar Negeri (FLN)	366978	218588	1,68 <sup>c</sup>
Tren Waktu (T)	5740	3377	1,70 <sup>c</sup>
FLN * T	-4872	3207	-1,52 <sup>n</sup>
Durbin-Watson stat	1,6155		
Uji DF ko-integrasi	-5,798 <sup>a</sup>		
R <sup>2</sup>	0,8880		
F <sub>(6,47)</sub>	62,09 <sup>a</sup>		

Variabel tak bebas: Jumlah penumpang penerbangan internasional; <sup>a)</sup> signifikan pada 99%; <sup>b)</sup> signifikan pada 95%; <sup>c)</sup> signifikan pada 90%; <sup>n)</sup> tidak signifikan

Sumber: Hasil analisis

sebagai efek pengganda dari penghapusan fiskal luar negeri, sehingga pehilangan penerimaan dari penghapusan fiskal luar negeri tersebut dapat tergantikan atau bahkan terlampaui oleh potensi penerimaan pajak dari kepemilikan NPWP bagi para wajib pajak baru. Namun demikian, ini hanya dugaan yang perlu penelitian lebih lanjut.

Hasil analisis dampak penghapusan fiskal luar negeri terhadap jumlah penumpang ke luar negeri disajikan pada Tabel 3, 4, dan 5. Secara keseluruhan, pada Tabel 3 terlihat bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,89. Ini menunjukkan bahwa 89% variasi

variabel tak bebas dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang dipilih sebagai penjelas dalam kajian ini. Sisanya 11% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model analisis.

Variabel-variabel yang dipakai untuk membangun fungsi permintaan mempunyai tanda yang diharapkan. Adanya fiskal luar negeri tidak berpengaruh terhadap rata-rata jumlah penumpang penerbangan internasional, bahkan jumlah penumpang setelah penghapusan fiskal cenderung lebih tinggi. Namun demikian, laju pertambahan jumlah penumpang setelah penghapusan fiskal lebih tinggi diban-

Tabel 4. Hasil estimasi model (2)

Variabel bebas	Koef.	Std. Err.	t-stat
Konstanta	145503	533951	0,27 <sup>n</sup>
Indeks Harga Konsumen (IHK)	-154,7	485,6	-0,2 <sup>n</sup>
Nilai Tukar Rupiah (NTR)	-75,80	38,33	-1,98 <sup>b</sup>
Produk Domestik Bruto (PDB)	1,485	0,746	1,99 <sup>b</sup>
Fiskal Luar Negeri (FLN)	287321	209594	1,37 <sup>n</sup>
Tren Waktu (T)	3959	3279	1,21 <sup>n</sup>
FLN * T	-3765	3071	-1,23 <sup>n</sup>
Jumlah penumpang sebelumnya	0,3218	0,1280	2,51 <sup>b</sup>
Durbin-Watson stat	2,1192		
Uji DF ko-integrasi	-7,630 <sup>a</sup>		
R <sup>2</sup>	0,9015		
F <sub>(6,46)</sub>	604 <sup>a</sup>		

Variabel tak bebas: Jumlah penumpang penerbangan internasional; <sup>a)</sup> signifikan pada 99%; <sup>b)</sup> signifikan pada 95%; <sup>c)</sup> signifikan pada 90%; <sup>n)</sup> tidak signifikan.

Sumber: Hasil analisis

ding ketika ada pembayaran fiskal.

Nilai F menunjukkan sangat signifikan, namun terdapat variabel yang secara individual tidak signifikan. Kalau dilihat dari hasil uji Durbin-Watson, hasil estimasi model (1) menderita autokorelasi yang ditunjukkan dengan nilai statistik Durbin-Watson sebesar 1,62, yang jauh lebih kecil dari nilai 2 (Gujarati & Porter, 2008). Oleh karena itu inferensi statistik tidak bisa dilakukan karena nilai *t-stat* belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa estimasi model (1) menunjukkan kointegrasi, artinya bahwa variabel yang dianalisis mempunyai derajat autoregresi yang sama, dan analisis bisa dilanjutkan (Wooldridge, 2009).

Adanya autokorelasi diatasi dengan memasukkan variabel tak bebas bulan sebelumnya, karena hasil diagnosis menunjukkan bahwa autokorelasi terjadi pada tingkat-1. Tabel 4 menyajikan hasil estimasi Persamaan (2) yang sudah memasukkan variabel tak bebas bulan sebelumnya. Terlihat bahwa hasil uji Durbin-Watson sudah tidak menunjukkan adanya autokorelasi karena nilai statistik Durbin-Watson sudah mendekati 2. Nilai F dan R<sup>2</sup> masih tetap tinggi, serta tanda setiap variabel bebas masih konsisten, namun banyak variabel bebas yang secara individual menunjukkan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan adanya gejala multikolinear di antara variabel bebas yang. Salah satu korelasi yang sangat kuat terjadi pada variabel PDB dan T. Hasil estimasi setelah

menggabungkan variabel PDB dan T disajikan di Tabel 5.

Hasil estimasi model (3) menunjukkan bahwa kenaikan indeks harga, atau adanya inflasi, cenderung menurunkan jumlah penumpang tujuan luar negeri. Ini jelas karena adanya inflasi menunjukkan kenaikan harga secara umum, sehingga permintaan cenderung turun. Tidak adanya signifikansi hasil analisis merupakan indikasi bahwa terjadi kenaikan dan penurunan inflasi, tetapi jumlah penumpang terus bertambah dari waktu ke waktu.

Nilai tukar Rupiah terhadap US\$ berpengaruh negatif secara signifikan. Naiknya nilai tukar Rupiah, yang dalam hal ini melemahnya nilai Rupiah terhadap US\$, menyebabkan harga tiket yang dipatok dengan US\$ menjadi naik karena diperlukan Rupiah yang lebih banyak. Hal ini merupakan keadaan yang wajar. Kenaikan nilai US\$ sebesar Rp1 menyebabkan jumlah penumpang turun sebanyak kira-kira 90 orang. Pengaruh melemahnya nilai tukar Rupiah ini sejalan dengan hasil analisis yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri (Ashraf dan Chowdhury, 2010; Hermawan, 2011; Hermawan, 2011).

PDB berpengaruh positif secara signifikan. Hal ini adalah wajar, karena naiknya PDB mengindikasikan kenaikan pendapatan masyarakat, sehingga permintaan penerbangan ke luar negeri juga naik. Ini juga indikasi bahwa bepergian ke luar negeri merupakan barang normal. Terlihat bahwa jika PDB naik sebesar

Tabel 5. Hasil estimasi model (3)

Variabel bebas	Koef.	Std. Err.	t-stat
Konstanta	-436380	538474	-0,81 <sup>n</sup>
Indeks Harga Konsumen (IHK)	-142,6	500.6	-0,28 <sup>n</sup>
Nilai Tukar Rupiah (NTR)	-89.859	38.839	-2,31 <sup>b</sup>
Prediksi Produk Domestik Bruto (PDB)	2,8255	1,0967	2,58 <sup>b</sup>
Fiskal Luar Negeri (FLN)	1040568	741621	1,40 <sup>n</sup>
FLN* PDB	-1,6533	0,8841	-1,87 <sup>b</sup>
Jumlah penumpang sebelumnya	0,3912	0,1270	3,08 <sup>a</sup>
Durbin-Watson stat	1,9157		
Uji DF ko-integrasi	-6,841 <sup>a</sup>		
R <sup>2</sup>	0,8930		
F(6,47)	65,39 <sup>a</sup>		

Variabel tak bebas: Jumlah penumpang penerbangan internasional; <sup>a</sup>) signifikan pada 99%; <sup>b</sup>) signifikan pada 95%; <sup>c</sup>) signifikan pada 90%; <sup>n</sup>) tidak signifikan.

Sumber: Hasil analisis

1 milyar, maka jumlah penumpang ke luar negeri naik sebesar 3 orang. Perlu diingat bahwa rata-rata hasil prediksi PDB meningkat sebesar Rp2618,72 milyar setiap bulan<sup>2</sup>. Dengan demikian rata-rata kenaikan jumlah penumpang yang bepergian ke luar negeri setiap bulan sebagai akibat dari kenaikan PDB adalah 7397 orang.

Rata-rata jumlah penumpang ke luar negeri sebelum dan setelah penghapusan fiskal luar negeri tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Namun demikian laju peningkatan jumlah penumpang ke luar negeri setelah penghapusan fiskal lebih tinggi dibanding dengan ketika masih diberlakukan pembayaran fiskal. Setelah penghapusan fiskal luar negeri, laju kenaikan jumlah penumpang seiring dengan kenaikan PDB adalah sebesar 4319,7 ( $=1.65 \times 2618,72$ ) lebih tinggi dibanding sebelum penghapusan fiskal. Hal yang menarik bahwa akibat penghapusan fiskal ini menyebabkan naiknya laju jumlah penumpang internasional dari 7397 orang per bulan menjadi 11717 orang per bulan. Tentu saja ini hal yang menggembarakan karena kegiatan ekonomi yang melibatkan hubungan luar negeri menjadi lebih tinggi. Perlu diingat bahwa bepergian ke luar negeri saat ini tidak melulu kegiatan konsumtif, tetapi juga merupakan kegiatan produktif karena adanya perjanjian-perjanjian yang erat kaitannya dengan perdagangan internasional. Para pelaku bisnis sekarang dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dengan biaya yang lebih murah, untuk melakukan negosiasi dan pemasaran produknya langsung ke luar negeri. Masyarakat telah menyambut positif penghapusan fiskal tersebut.

#### 4. Simpulan

Kebijakan pemerintah yang menghapus pembayaran fiskal luar negeri bagi orang dewasa yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari memang seharusnya dilakukan. Ada kekhawatiran adanya penurunan penerimaan negara dari pajak penghasilan akan turun secara drastis setelah

kebijakan tersebut diberlakukan. Di lain pihak, kebijakan tersebut diharapkan menjadi iklim yang baik bagi penerbangan internasional di Indonesia. Di era globalisasi ini, perjalanan ke luar negeri sudah menjadi kebutuhan. Jika pembayaran fiskal masih diberlakukan, maka akan membebani penumpang, sehingga ada kecenderungan berkurangnya jumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Pada akhirnya, keadaan ini membuat iklim bisnis penerbangan internasional di Indonesia menjadi lesu.

Kekhawatiran akan turunnya penerimaan negara dari pajak penghasilan ternyata tidak terjadi. Justru, setelah penghapusan fiskal luar negeri, jumlah penerimaan negara dari pajak penghasilan naik lebih cepat. Masyarakat masih membayar tetap membayar pajak penghasilan walaupun sudah tidak lagi membayar fiskal pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Diduga, adanya kampanye untuk memiliki NPWP bagi warga negara rupanya sudah berhasil dalam meningkatkan potensi penerimaan negara dari pajak penghasilan.

Dengan menggunakan model fungsi permintaan yang dianalisis menggunakan metoda ekonometri, kajian ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan laju jumlah penumpang setelah dihapuskannya pembayaran fiskal luar negeri. Hal ini sesuai dengan harapan, yaitu memperbaiki iklim bisnis penerbangan internasional di Indonesia. Seperti yang diharapkan, faktor lain yang meningkatkan jumlah penumpang tujuan luar negeri yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, yang ditunjukkan dengan naiknya produk domestik bruto. Sedangkan yang menyebabkan turunnya jumlah penumpang tujuan luar negeri adalah melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap US\$. Inflasi mempunyai kecenderungan untuk menurunkan jumlah penumpang, tetapi tidak signifikan.

Implikasi dari kajian ini adalah menjaga kestabilan perekonomian Indonesia agar inflasi dan nilai tukar Rupiah stabil. Kajian yang menelaah dampak penghapusan fiskal luar negeri ini masih awal dan belum banyak dilakukan. Ada kekhawatiran lainnya bahwa ada ancaman bagi sektor pariwisata Indonesia setelah diberlakukan kebijakan tersebut. Oleh

<sup>2</sup> Hasil prediksi menunjukkan regresi  $\overline{PDB} = 500364,3 + 2618,2T$ ;  $R^2 = 0,9544$ ;  $F_{(1, 52)} = 1088,13$

karena itu, tantangan bagi penulis, khususnya, dan bagi peneliti ekonomi dan pariwisata pada umumnya, untuk terus mengkaji masalah yang berhubungan dengan penghapusan fiskal luar negeri.

### 5. Daftar Pustaka

- Alcala, F. & Ciccone, A. 2004. Trade and productivity. *Quarterly Journal of Economics*, 119 (2): 613-646.
- Ashraf, M.A. & Chowdhury, A.Z. 2010. Determinants of Bangladesh's export flows to the USA, 2003-2010: an empirical review. *Jurnal Agro Ekonomi*, 28 (2): 189 – 199.
- Barus, O.P. 2009. *Dampak pemberlakuan tarif fiskal luar negeri terhadap jumlah penumpang pada maskapai penerbangan*. Skripsi. Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, Medan (Tidak dipublikasikan).
- Baumol, W.J. & Blinder, A. S. 2007. *Microeconomics: principles and policy*, 10th edition, Thomson South-Western, USA. 517h.
- Berita Daerah, 2009. *Penjualan tiket penerbangan luar negeri turun drastis*. Berita Daerah.Com, edisi 6 Januari 2009. <http://beritadaerah.com/berita/sumatra/6819> (Diakses 22 Agustus 2010)
- Dye, T. R. 2008. *Understanding public policy* (12th Edition). New Jersey: Prentice-Hall.
- Erwidodo, H & Hadi, P. 2003. Impor jagung: perlukah tarif impor diberlakukan: jawaban analisis simulasi. *Jurnal Agro Ekonomi*, 21 (2): 175-195.
- Friedrich, C. J., 2007. Public policy and the nature of administrative responsibility. In: Carl J. Friedrich (ed). *Public Policy*. Style Press, Cambridge, 404h.
- Gujarati, D. 2003. *Basic Econometrics*. Singapore: Prentice Hall.
- Hadi, P. & Nuryanti, S. 2005. Dampak kebijakan proteksi terhadap ekonomi gula Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 23 (1): 82-99.
- Hadi, P. & Wiryo, B. 2005. Dampak kebijakan proteksi terhadap ekonomi beras di Indonesia, *Jurnal Agro Ekonomi*, 23 (2): 159-174.
- Hermawan, I. 2011. Analisis dampak kebijakan makroekonomi terhadap perkembangan industri tekstil dan produk tekstil Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, April: 375-408.
- Hermawan, M. 2011. The determinant and trade potential of export of the Indonesia's textile products: a gravity model. *Global Economy and Finance Journal*, 4 (2): 13-32.
- Jalles, J.T. 2012. Openness, regional trade agreements and growth: evidence from Asia. *Asian Economic Journal*, 26 (1): 63–85.
- Karseno, A.R. & Adjie, A., 2001. *Kebijakan ekonomi dan pembangunan kelembagaan di Indonesia*. Balapan, Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan, AMP YKPN, [2001] x, 110 h.
- Mariyono, J. & Kuntariningsih, A. 2009. Gender analysis of demand for health services in rural areas of Java, Indonesia. *Journal of Rural Development*, 28 (3): 317-326.
- Mariyono, J. 2006. Kontribusi teknologi pengendalian hama terpadu pada penurunan penggunaan pestisida: kasus produksi padi di Yogyakarta. *Jurnal Matematika, Sains dan Teknologi*, 7 (2): 128-138.
- Mariyono, J. 2008a. The impact of integrated pest management technology on insecticide use in soybean farming in Java, Indonesia: two models of demand for insecticides. *Asian Journal of Agriculture and Development*, 5 (1) 43-56.
- Mariyono, J. 2008b. Direct and indirect impacts of integrated pest management on pesticide use: a case of rice agriculture in Java, Indonesia. *Pest Management Science*, 64 (10):1069–1073.
- Nicholson, W. & Snyder, C.M. 2011. *microeconomic theory: basic principles and extensions*. 11th edition, South Western Cengage Learning, Mason – USA. 784h.
- Republik Indonesia, 2012. *Nota keuangan dan RAPBN-P 2012*, Republik Indonesia, Jakarta.
- Ridwan, 2009. Dampak integrasi ekonomi terhadap investasi di kawasan asean: analisis model gravitasi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 5 (2): 95-107.

**Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16 (1), Juni 2015, 22-32**

- Rose, R., 2004. *Learning from comparative public policy: a practical guide: a guide to analysis*. Routledge, Taylor & Francis, 2004 London 160h.
- Salvatore, D. 2007. *Managerial economics: principles and worldwide applications*, 6<sup>th</sup> edition. USA: Oxford University Press. , 656h.
- Sheng, Y., Tang, H.C. & Xu, X. 2012. The impact of ACFTA on People's Republic of China-ASEAN trade: estimates based on an extended gravity model for component trade. *Working Paper no 99, ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration*.
- SMINET, 2012. *Negara dan Bandar Udara*. SriMulyani.net. diakses dari <http://srimulyani.net/tag/penghapusan-biaya-fiskal> (Diakses 17 Agustus 2012)
- Suara Merdeka, 2004. *Rencana penghapusan fiskal Patut Didorong*. Tajuk rencana. harian Suara Merdeka, Sabtu, 21 Agustus 2004. (Diakses Tanggal 17 Agustus 2012)
- Gujarati, D.N., Porter, D. 2008. *Basic econometrics*. New York: McGraw Hill.
- Widjaya, A.G. 2011. Studi evaluasi kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008 dan implikasinya terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas, Diponegoro Semarang (Tidak dipublikasikan).
- Wooldridge, J.M. 2009. *Introductory econometrics: a modern approach*. South-Western Congade Learning, Mason USA, 865h.

**Lampiran**

Lampiran 1. Hasil Uji Unit-root dengan Dicket-Fuller

Variabel	Z(t)	Interpolated Dickey-Fuller			Signifikan
		1%	5%	10%	
PI	-1,223	-3,576	-2,928	-2,599	tidak
IHK	-1,349	-3,576	-2,928	-2,599	tidak
NTR	-2,976	-3,574	-2,927	-2,598	tidak
PDB	-0,865	-3,576	-2,928	-2,599	tidak
Residual 1	-5,798	-3,576	-2,928	-2,599	ya
Residual 2	-7,630	-3,576	-2,928	-2,599	ya
Residual 3	-6,841	-3,576	-2,928	-2,599	ya

Lampiran 2. Matriks korelasi antarvariabel (awal)

Korelasi	PI	IHK	NTR	PDB	T
PI	1				
IHK	-0,0148	1			
NTR	-0,8205	-0,0433	1		
PDB	0,9306	0,0028	-0,83	1	
T	0,9185	-0,0247	-0,8137	0,9769	1

Lampiran 3. Matriks korelasi antarvariabel (koreksi)

Korelasi	PI	IHK	NTR	$\overline{PDB}$
PI	1			
IHK	-0,0148	1		
NTR	-0,8205	-0,0433	1	
$\overline{PDB}$	0,9185	-0,0247	-0,8137	1